

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Mengingat sumber daya manusia merupakan salah satu aset nasional yang mendasar dan faktor penentu utama bagi keberhasilan pembangunan, maka dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki landasan yang berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah merupakan komponen terbesar dalam pembagian organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan untuk organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perusahaan atau sektor privat. Akuntansi sektor publik terdiri atas akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan, dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata, tetapi sektor publik atau pemerintah dibentuk dengan tujuan umum memberikan pelayanan publik atau mensejahterakan rakyat (Mahmudi, 2010:18).

Upaya yang paling strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi negara dan bangsa Indonesia. Sebab dengan pendidikan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan akan berarti dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bilamana pendidikan tersebut memiliki sistem yang berkualitas dan relevan dalam pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan secara optimal. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “ kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia “ untuk maksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang relevan dalam pembangunan.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui kebijakan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Komitmen pemerintah tersebut ditandai dengan ditetapkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengutamakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib yang kurang mampu. Namun dalam pelaksanaan masih mengalami berbagai hambatan baik yang terikat pada aspek kelembagaan maupun pada teknis operasinya. Hal ini

mengindikasikan bahwa pengelolaan dan Bos masih belum berjalan maksimal yang berujung pada akuntabilitas pengelolaannya juga belum optimal.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang didukung dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut sangat tepat dan bermanfaat dalam peningkatan pendidikan nasional. Diharapkan kebijakan pemerintah tersebut berdampak positif bagi dunia pendidikan dan terutama bagi masyarakat anggaran publik setidaknya ditandaioelh dua hal yaitu bebas pemborosan dan bebas korupsi. Pemborosan anggaran publik selama ini sering muncul dalam berbagai bentuk antara lain : (i) pengeluaran-pengeluaran negara yang berada pada tingkat yang tidak wajar, ((ii) kegiata-kegiatan pejabat publik yang tidak bermanfaat bagi rakyat, seperti studi banding dan penelitian yang tidak jelas tujuannya an (iii) duplikasi kegiatan baik yang bersifat lintas program maupun lintas instansi. Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa akuntabilitas merupakan salah satu azaz dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu sekolah yang mendapat perhatian dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah SD Se-Kecamatan Rambah mendapat bantuan-bantuan Operasional yang telah digunakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang dikelola di SD.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti kembali dan mengambi ljudul penelitian tentang “**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SD Se Kecamatan Rambah)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SD Se Kecamatan Rambah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sistem akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah SD Se-Kecamatan Rambah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis digunakan adalah memberikan sumbangan pemikiran untuk mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu manajemen keuangan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini hasilnya dapat diharapkan bermanfaat bagi pihak yang terkait yaitu :

a) Bagi peneliti pribadi, hasilnya penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman baru serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam lingkup pendidikan.

b) Bagi pengelolaan dana BOS (Bendahara Sekolah)

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagaimana seharusnya pengelolaan dana BOS yang benar, akuntabilitas dan sesuai dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS dari pemerintah.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS dan memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis apakah pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS dari pemerintah.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan menilai sistem “ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SD Se-Kecamatan Rambah.

1.6 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Tutus Julantika (2014) Universitas Jember (UNEJ) dengan judul penelitian “ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan dana BOS SDN Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember tahun 2014

pada penelitian ini dinilai dari jumlah dana BOS yang direncanakan dengan dana BOS yang digunakan. Kesesuaian penggunaan di sini dilihat dari angka ratio yang ditunjukkan. Ratio dalam penelitian ini adalah angka yang menunjukkan kemampuan sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan dana BOS yang sudah direncanakan di awal pembelajaran. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan angka ratio yang diperoleh sekolah pada tahun 2014.

Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Tahun pengamatan sebelumnya tahun 2014 sedangkan penelitian ini pada tahun 2020.
2. Objek pada penelitian sebelumnya di SDN Pringgowirawan 02 Jember sedangkan penelitian ini di SDN Se-Kecamatan Rambah.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, sampel dan instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan hasil penelitian, deskriptif data penelitian, demografi responden dan analisis statistik.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini hasil dalam penelitian dijelaskan secara ringkas melalui kesimpulan, dan mengemukakan saran-saran untuk pengembangan hasil penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Akuntabilitas Publik

Menurut Akbar (2012) bahwa akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Dalam buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas dan Depdagri (2012) disebutkan bahwa: Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau Keterbukaan Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip akuntabilitas Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. *Prinsip value for money* Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat. Adapun dimensi-dimensi akuntabilitas pada organisasi sektor publik menurut Hopwood dan Tomkins (1942) dan Edwood (1993) dalam Mahmudi, (2013: 10), adalah :

a. Akuntabilitas Program (*program accountability*),

2.1.2 Implementasi Akuntabilitas

Sejak era reformasi telah dilaksanakan implementasi akuntabilitas di Indonesia karena respon publik untuk membenahi sistem birokrasi agar dapat diimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Akuntabilitas, transparansi, dan hadirnya partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan *good governance*. Semua unsur tersebut harus diimplementasikan dalam setiap program pemerintah termasuk pada pembangunan

pada sektor pendidikan. Berbagai kebijakan telah diimplementasikan pemerintah dalam rangka perwujudan *good governance*.

Kebijakan tersebut antara lain diterbitkannya Inpres No. 7 tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini menginstruksikan setiap akhir tahun seluruh instansi pemerintah (dari eselon II ke atas) wajib menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Diharapkan melalui kebijakan LAK ini, maka seluruh instansi pemerintah dapat menyampaikan pertanggungjawabannya dalam bentuk yang kongkrit ke arah pencapaian visi dan misi organisasi. Selain itu untuk menghadirkan pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan aspirasi masyarakat, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang – undang ini berisi uraian azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN dan menunjukkan kinerja birokrasi pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun wujud lain dari implementasi akuntabilitas adalah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 14 ayat (2) secara khusus menekankan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capainya. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan birokrasi pemerintah untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara anggaran pemerintah (APBN dan APBD) dengan kinerja yang

akan dicapainya berdasarkan perencanaan strategik yang telah disusun. Berbagai upaya pemerintah untuk mewujudkan *good governance* terutama dalam konteks implemetasi akuntabilitas dinilai oleh banyak kalangan sudah sangat tepat. Namun demikian, faktanya implemetasi akuntabilitas masih mengalami berbagai kendala. Kendala yang dominan adalah keterbatasan sarana dan prsarana pendukung implemetasi kebijakan, SDM aparat, ketidakpuasan atas kesejahteraan pegawai dan kebiasaan mendahulukan kepentingan pribadi dan keluarga (nepotisme).

2.1.3 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bahagian integral dari sistem keuangan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program BOS tersebut diberikan kepada sekolah dalam bentuk dana. Dana BOS adalah dana Lembaga Pendidikan yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah, yakni Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Untuk mendukung program dana BOS, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012. Dengan demikian berdasarkan dari ketentuan tersebut maka setiap pengelolaan dana BOS yang diterima oleh sekolah harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk teknis yang secara formal telah ditetapkan oleh pemerintah.

2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan dana BOS dapat dilihat melalui beberapa hal yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana BOS, yaitu sebagai berikut :

1. Proses Pembuatan Keputusan

Dalam proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan Dana BOS, harus memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku serta sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar. Keputusan yang dibuat harus secara tertulis dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait. Dalam proses pembuatan keputusan tersebut salah satu yang harus dipahami adalah kegunaan dana BOS, yaitu untuk :

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
- b. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- d. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.

- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
- f. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKS/ MKKS.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.
- h. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- i. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.
- k. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah agama non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
- l. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, pengadaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- m. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah.
- n. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah

selain kewajiban jam mengajar. Besaran/ satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.

2. Akurasi Dan Kelengkapan Informasi

Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas maka akurasi dan kelengkapan informasi merupakan hal yang sangat penting. Bagi pengelola dana BOS dalam menjalankan tugas akurasi dan kelengkapan informasi seharusnya dimiliki. Berdasarkan peraturan dinyatakan bahwa Tugas dan Tanggungjawab Sekolah dalam pengelolaan dan BOS adalah:

- a. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
- b. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana isekolah
- c. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- d. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim PKPS-BBM Kab/Kota.

3. Kejelasan Dari Sasaran

Dalam organisasi publik anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Jadi persoalan penganggaran akan terkait dengan keuangan negara dan juga akuntabilitas. Karena itu adalah sangat penting adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan hal itu seharusnya dapat dikomunikasikan dalam pengelolaan dana BOS. Kejelasan dari sasaran kebijakan mengandung makna bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan yang didanai dari dana BOS harus memiliki kejelasan yang tepat dalam arti tidak mengandung

multitafsir. Dengan adanya kejelasan dari sasaran tersebut akan memperjelas dan mempermudah pelaksanaan program dana BOS.

4. Kelayakan Dan Konsistensi.

Prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari pemerintah Pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, misalnya dari pemerintah daerah. Dalam konteks kelayakan dan konsistensi pengelolaan dana BOS, dapat dilihat melalui sekolah penerima BOS sesuai ketentuan , yaitu :

- a. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS. Khusus sekolah swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang terutang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini.
- b. Sekolah kaya/ mapan/ yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Bilamana di sekolah terdapat siswa miskin, sekolah tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut.

5. Penyebarluasan Informasi

Mengenai Pengelolaan Dana BOS Salah satu unsur dari akuntabilitas publik adalah: adanya transparansi melalui penyebarluasan informasi dari suatu keputusan atau kebijakan yang dilakukan melalui media massa, media komunikasi personal, media sosial dan lainnya. Namun demikian transparansi tersebut harus berjalan seimbang dan tetap menjaga kerahasiaan lembaga maupun informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Salah satu bentuk transparansi melalui penyebarluasan informasi pengelolaan dana BOS adalah adanya upaya menginformasikan tentang mekanisme dan syarat penyaluran dana, yaitu :

- a. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin sekolah, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga
- b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim PKPS BBM Kabupaten/Kota (Format BOS -03)
- c. Tim PKPS BBM Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim PKPS BBM Propinsi (Format BOS -04A), disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS (Format BOS -04B)
- d. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim PKPS-BBM Tingkat Propinsi melalui PT. Pos/Bank Pemerintah.
- e. Satker PKPS-BBM Propinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi.
- f. Dinas Pendidikan Propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPPLS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

g. Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Propinsi. h. KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekenis Kas Negara. Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi dan Lembaga Penyaluran (Pos/Bank). Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dan Sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan dan Tim PKPSBBM Propinsi untuk diselesaikan.

6. Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring

Hasil Agar dapat bersaing maka organisasi publik saat ini harus mengadopsi perkembangan era digital melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Fakta menunjukkan bahwa peran TI begitu berpengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi. Faktor Penyebabnya adalah karena TI dapat digunakan untuk meningkatkan peran monitoring, membantu organisasi dalam mewujudkan efisiensi proses back office, meningkatkan kualitas mulai kegiatan administrasi, proses-proses external dan internal, membantu mengambil keputusan, merencanakan ke depan bagi keberlangsungan kegiatan dan apa yang menjadi sasaran kegiatan, karena terpantaunya kegiatan melalui sistem informasi. Sekaitan

dengan hal tersebut, maka peran IT juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana BOS. IT dapat digunakan sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk membantu dalam membangun sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Dengan kata lain jika IT atau teknologi komunikasi dapat diterapkan di lingkungan sekolah, maka akan membantu mempermudah pengelolaan dana BOS.

7. Laporan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 dijelaskan bahwa Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS,

masingmasing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Kemudian secara khusus, isi laporan harus dilengkapi dengan laporan tentang :

1. Penggunaan Dana BOS sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS dengan menggunakan Formulir BOS -K7
2. Lembar pencatatan pertanyaan/ kritik/saran.
3. Lembar pencatatan pengaduan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat dilihat ditabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
Tutu Julantika, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN	1. Mengidentifikasi Data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, maupun dokumentasi, yang bersumber dari buku,	Laporan pertanggung jawaban yang meliputi RKHS dan realisasi

(2017)	Pringgowirawan 02 Jember)	literature, dan foto. 2. mengklasifikasikan data yang masuk, kemudian disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. 3. melakukan interpretatif terhadap faktor yang mempengaruhi.	penggunaan dana BOS sudah menerbitkan setiap semester baik diberikan kepada wali murid tiap acara pembagian rapor maupun ditempel pada papan mading sekolah. Hanya saja realisasi sekolah harus dibenahi karna masihh terdapat beberapa kerancan pencataatan seperti tidak ditulis saldo pada laporan.
Masyitah (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekoah (Studi Kasus Di SDN 41 Birue Kabupaten Baru)	1. Pengumpulan data 2. Mereduksi data 3. Menyajikan data 4. Penarikan kesimpulan	Bahwa pada prinsipnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SDN 41 Birue sudah terlaksana dengan cukup sesuai dengan ketentuan, meskipun masih terdapat kendala teknis yang harus diperbaiki.
Sulfiatii F, Andi Samsu Alam, Andi Lukman	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional	Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses	1. Akuntabilitas pengelolaan dana BOS

Irwan (201)	Sekoah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai.	analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.	diantaranya meliputi akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal, perencanaan pengelolaan dana bos meliputi perencanaan anggaran dana bos dan perencanaan sdm pengelola dana bos. Pelaksanaan pengelolaan dana bos diawali dengan kegiatan penyaluran dana BOS. Kegiatan evaluasi pengelolaan dana bos dilakukan dalam bentuk pengawasan dan monitoring.
--------------	--	--	---

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) Se Kecamatan Rambah, penelitian ini fokus pada bentuk akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Penelitian pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ini difokuskan pada penerapan sistem akuntabilitas bantuan operasional sekolah (BOS) dalam tahun Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan didasarkan pada berlandaskan fenomenologi. Menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena dan naturalistik tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah Seluruh Sekolah Dasar di Kecamatan Rambah yang berjumlah 22 sekolah.

3.3.2 Sampel

Teknik sampling penelitian adalah *sampling jenuh* yaitu seluruh populasi dijadikan sampel, dan terdiri dari 44 responden merupakan Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

SumberData dibagi menjadi dua jenis yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer yang diinginkan adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara Kuisisioner dengan pertanyaan yang diajukan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga atau literature, artikel, buku dan dokumentasi lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner dan dokumentasi. Selanjutnya pada penelitian ini difokuskan pada variabel akuntabilitas pengelolaan BOS di SD melalui indikator: Pembuatan Keputusan, Akurasi Dan Kelengkapan Informasi, Kejelasan Sasaran, Kelayakan Dan Konsistensi, Penyebarluasan Informasi, Sistem Informasi Manajemen Dan Monitoring Hasil Serta Laporan Pertanggungjawaban.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah maka penelitian menggunakan jenis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan. Analisis data yang dilakukan adalah mempelajari segenap aktivitas pada SD se Kecamatan Rambah, tapi dalam hal ini adalah tentang Akuntabilitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Metode ini juga dilakukan dengan menggunakan metode komparatif. Metode komparatif merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan jawaban responden dengan jumlah jawaban responden. Dan hasil analisis digunakan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian dan diproses dengan cara dijumlahkan, kemudian dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase. Dalam pengelolaan data hasil pertanyaan observasi yang penulis sajikan menggunakan pertanyaan tertutup yang memungkinkan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Pilihan jawaban yang diberikan adalah Ya dan Tidak. Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden, dilakukan analisis statistik dengan menggunakan rumus Dean J. Champion (1990:302). Untuk keperluan interpretasi hasil perhitungan persentase, Dean Champion mengemukakan sebagai berikut:

- a. 0% - 25% : berarti penerapan Akuntabilitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah tidak baik
- b. 25% - 50% : berarti penerapan Akuntabilitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah kurang baik.
- c. 50%- 75% : berarti penerapan Akuntabilitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah cukup baik.
- d. 75% – 100% : berarti penerapan Akuntabilitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah sangat baik.

Selanjutnya dalam menganalisis data Akuntabilitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah juga menggunakan rumus Champion sebagai berikut:

Rumus :

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "ya"}}{\sum \text{Jumlah Jawaban observasi}} \times 100\%$$

3.6.1 Analisis Statistik

Data-data penulis diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi 15 (lima belas) pertanyaan yang berhubungan dengan Akuntabilitas Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah kepada 2 orang yaitu Kepala sekolah dan Bendahara sekolah. Dan melakukan perhitungan presentase dari hasil jawaban kuisisioner yang telah dikumpulkan.

Dalam pengelolaan data hasil pertanyaan-pertanyaan observasi penulis sajikan, pilihan jawaban yang penulis sajikan adalah Ya dan Tidak serta skor yang diberikan tiap alternatif jawaban adalah Ya=1 dan Tidak= 0.

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam mengolah jawaban kuisisioner adalah sebagai berikut:

1. Memisahkan jawaban responden sesuai dengan alternatif jawaban yang diberikan yaitu Ya dn Tidak
2. Skor masing-masing jawaban adalah Ya diberi nilai satu (1) dan Tidak diberi nilai nol (0).